

KRISIS LEGITIMASI ENERGI NUKLIR DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL: STUDI KASUS FUKUSHIMA

Verdinand Robertua

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia,
Jl. Mayjen Sutoyo 2 Cawang Jakarta 13630 Indonesia
Verdinand.robertua@gmail.com

Abstract

Reactor leak has brought economic and health disaster to Fukushima and Japanese society. Fukushima disaster is a legitimacy crisis of nuclear energy in answering demanding energy of Japan and the world. The research question is on how states deal with the dilemma and complexity of the legitimacy of nuclear energy in international political economy with the case study of Fukushima nuclear reactor leakage. Civil society organizations and environmental activists have worsened the legitimacy of nuclear energy as the solution of depleting energy resources. This is a qualitative research and using case study method and process-tracing. To answer the research question, this research is using English School Theory with its four pillars namely pluralism, solidarism, international society and world society. This research will use three concepts namely energy security and transnational activism. This research shows three findings. First, China's growing power has hampered Japan's wariness of nuclear energy. Second, US economic interest supported Japan's nuclear energy. Third, negative perception of Japanese society against foreign activist. Contribution of this research to English School development is that international society theory confirmed that history is able to answer problems in holistic and comprehensive way.

Keywords: Fukushima, nuclear energy, international political economy, English School, energy security

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kerusakan reaktor nuklir Tokyo Electric Power Company di Fukushima akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011. Kebocoran reaktor nuklir ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Jepang. Bencana Fukushima menjadi simbol krisis legitimasi energi nuklir dalam menjawab kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana negara menghadapi kompleksitas dan dilema dalam legitimasi energi nuklir dalam ekonomi politik internasional dengan menggunakan studi kasus kebocoran reaktor nuklir Fukushima. Koalisi masyarakat sipil dan tekanan negara-negara anti-nuklir telah memperparah legitimasi energi nuklir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan process-tracing. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, analisis media, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori English School Theory dengan empat pilarnya yaitu pluralisme, solidarisme, masyarakat dunia dan masyarakat internasional. Konsep yang digunakan penelitian ini adalah energy security dan aktivisme transnasional. Hasil penelitian ini adalah faktor Tiongkok yang mengancam stabilitas kawasan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan persepsi negatif masyarakat Jepang terhadap gerakan anti-nuklir telah mengembalikan legitimasi nuklir dalam kebijakan energi Jepang. Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan English School adalah penguatan teori masyarakat internasional sebagai teori yang menekankan sejarah di dalam menjawab dilema permasalahan dan menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif.

Kata kunci: Fukushima, energi nuklir, ekonomi politik internasional, English School, energy security

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi adalah salah satu fenomena penting dalam ekonomi politik internasional dan energi nuklir menjadi salah satu solusi di dalam menjawab kebutuhan energi negara. Selain untuk memenuhi kebutuhan energi, pemanfaatan tenaga nuklir juga dikembangkan dalam berbagai bidang kegiatan seperti bidang industri, bidang kedokteran, bidang arkeologi, pertanian dan lain-lainnya (Ardhana 2007, 263). Jepang adalah negara memiliki reaktor nuklir terbanyak setelah Perancis. Jepang melakukan riset nuklirnya pada tahun 1954, dengan menghabiskan dana sekitar 230 Juta Yen (Araujo 2015). Pada tahun 1963, Jepang mulai membangun PLTN pertama yang mengusung teknologi Boiling Water Reactor (BWR). Hingga kini Jepang telah memiliki 55 PLTN. Kementrian Energi Jepang mengatakan bahwa Jepang berambisi menambah 24 PLTN baru hingga 2030.

Pada tanggal 11 Maret 2011 gempa bumi Tohoku terjadi di sebelah timur laut Jepang. Gempa berskala 9.0 skalarichter tersebut mengakibatkan terjadinya gelombang Tsunami yang melanda daratan Jepang. Bencana alam tersebut kemudian mengakibatkan kerusakan reaktor nuklir milik Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station di prefektur Fukushima. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Dai-ichi berjenis Boiling Water Reactor (BWR) yang mampu menghasilkan daya listrik sebesar 460 MW, dengan daya termal 1.553 MW dan asumsi efisiensi termal 30 persen. Reaktor tersebut dibangun pada akhir tahun 1960-an dan beroperasi awal 1970-an (McCurry 2016). Penahan terjangan tsunami yang di bangun dengan tinggi 6 meter tidak sanggup menghadang terjangan gelombang tsunami ke PLTN Fukushima. Kerusakan PLTN menyebabkan munculnya bencana baru di Jepang yaitu bencana nuklir yang menyebarkan zat radioaktif pembangkit listrik

Fukushima Daiichi. Bencana tersebut diakibatkan oleh kerusakan struktur reaktor akibat gempa dan kegagalan sistem pendingin reaktor nuklir yang menyebabkan meledaknya reaktor-reaktor nuklir dan menyebarkan unsur radioaktif ke lingkungan sekitar dalam radius 300 kilometer dari reaktor Fukushima Daiichi. Menurut Greenpeace (2012), pada Agustus 2013 sekitar 300 ton air pendingin reaktor bocor setiap harinya. Sekitar 30.000 km² wilayah daratan Jepang terkontaminasi Yodium-131 sebanyak 511.000 terabecquerel (TBq), Caesium-134 sebanyak 13.500 TBq, dan caesium-137 sebanyak 13.600 TBq (Kyoto University Graduate School of Global Environment Studies 2011, 1-4). Paparan radioaktif yang melebihi batas aman akan membahayakan kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Diantaranya yang berbahaya adalah menimbulkan kanker dan kematian.

Kejadian tersebut tentu merusak perekonomian Jepang. Gempa bumi, tsunami, dan bencana nuklir yang terjadi merusak sarana industri, perkantoran, dan tempat-tempat aktivitas ekonomi lainnya di Jepang. Steven Starr (*Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster* 2014) memprediksi total kerugian bencana alam dari segi material diperkirakan lebih dari US\$ 309 miliar atau 25 triliun Yen. Bencana alam 11 Maret 2011 pun dinyatakan sebagai bencana alam yang memakan kerugian terbesar di dunia. Termasuk kegiatan perikanan dan perdagangan hasil perikanan Jepang, baik secara domestik maupun internasional. Pencemaran radioaktif pada perairan setempat dan di Samudera Pasifik ini menyebabkan tercemarnya pula produk-produk perikanan yang terdapat di sekitar prefektur Fukushima serta di beberapa prefektur di sekitar Fukushima. Kejadian ini mendapatkan perhatian internasional dimana negara-negara untuk sementara waktu menghentikan kegiatan perdagangannya dengan Jepang. Korea Selatan merupakan negara utama tujuan ekspor produk-produk perikanan Jepang dan

menghentikan impor produk perikanan Jepang akibat kontaminasi unsur radioaktif dalam produk-produk perikanan Jepang.

Insiden di PLTN Fukushima Daiichi dinyatakan termasuk kecelakaan dengan skala 4 dan tidak lama kemudian meningkat pada skala 7 yang setaraf dengan insiden PLTN Chernobyl di Uni Soviet. Insiden di PLTN Fukushima Daiichi ini memaksa warga sekitar PLTN Fukushima dievakuasi dengan radius 20 km. Lebih dari 80.000 penduduk harus berpindah karena lokasi rumah mereka yang berada dekat dengan PLTN (Kingston 2012, 127). Bahaya radiasi tidak hanya mengancam penduduk sekitar saja, namun merusak pertanian, peternakan serta perikanan.

Gerakan anti nuklir menyebar semakin luas di Jepang dengan adanya bencana PLTN Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Legitimasi penggunaan energi nuklir memang diperdebatkan. Kalangan aktivis lingkungan menentang keras pembangkit listrik energi nuklir baru di beberapa negara. Penelitian ini fokus kepada legitimasi penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Sejauh mana masyarakat menerima energi nuklir sebagai sumber energi yang dapat diandalkan dalam perekonomian negara?

Daniel Blackmore (2013) menganalisis reaksi Jerman terhadap bencana nuklir Fukushima dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan Jerman terhadap energi nuklir dimana energi nuklir menjadi semakin berbahaya untuk digunakan sehingga Jerman memutuskan untuk menutup semua PLTN tua sampai 2022 dan memperbesar kontribusi energi terbarukan. Blackmore menggunakan perspektif konstruktivis untuk menjelaskan keberhasilan gerakan anti-nuklir Jerman. Dalam penelitian Blackmore, partai politik Jerman dan bencana Fukushima menjadi dua faktor utama transformasi kebijakan energi nuklir Jerman.

Mikha Benanta Purba (2013) juga mengamati konsekuensi negatif energi nuklir dalam

ekonomi politik internasional. Dengan studi kasus Perancis, Purba berkesimpulan bahwa legitimasi energi nuklir menjadi diragukan sebagai sumber energi yang diandalkan. Setelah bencana PLTN Fukushima, Perancis berencana menutup 20 reaktor nuklir untuk mengurangi dependensi Perancis terhadap energi nuklir. Realisasi dari kebijakan ini dimulai di akhir tahun 2016 dengan menutup dua reaktor nuklir Fessenheim.

Meskipun mendapatkan reaksi negatif di Perancis dan Jerman, Masatsugu Hayashi dan Larry Hughes (2013) berpendapat bahwa bencana Fukushima gagal di dalam mentransformasi kebijakan energi nuklir Jepang. Hayashi dan Hughes menggunakan konsep *energy security* (*energy security*) dengan mengevaluasi dampak Fukushima dalam tiga komponen yaitu *affordability*, *availability*, dan *acceptability*. Hayashi dan Hughes berkesimpulan bahwa kelangkaan sumber energi global, ketergantungan Jepang terhadap sumber energi luar energi dan stagnasi ekonomi Jepang menjadi faktor kembalinya legitimasi energi nuklir bagi Jepang.

Dengan menggunakan teori gerakan sosial, Tenny Widya Kristiana, Lisman Manurung, dan Susy Ong (2015) juga berkesimpulan bahwa bencana nuklir PLTN Fukushima tidak berhasil menjadi alat kampanye yang efektif bagi aktivis anti-nuklir Jepang untuk menutup reaktor nuklir Jepang. Meskipun terjadi perdebatan intensif mengenai legitimasi energi nuklir Jepang di dalam masyarakat Jepang setelah Fukushima, Partai Konservatif Jepang berhasil mempertahankan legitimasi energi nuklir dengan argumentasi bahwa PLTN adalah simbol independensi Jepang di dalam ekonomi politik internasional.

Bencana nuklir Fukushima telah memunculkan dilema mengenai energi nuklir. Di satu sisi, sumber energi fosil minyak bumi, gas dan batu bara tidak mampu mencukupi kebutuhan energi dunia yang melonjak tajam. Ketergantungan negara-negara maju seperti

Jepang dan Eropa menjadi alat yang efektif bagi negara-negara berkembang untuk mendikte negara-negara maju. Di sisi lain, energi nuklir menjadi solusi untuk menjawab kelangkaan energi dengan fasilitas reaktor nuklir yang efisien dan ketersediaan uranium yang melimpah. Bencana PLTN Chernobyl di Ukraina pada tahun 1986 dan bencana PLTN Fukushima 2011 menjadi dampak yang mengerikan di dalam penggunaan energi nuklir. Seperti yang diuraikan dalam beberapa paragraf di atas, kemunculan aktivis anti-nuklir di Jepang dan Perancis telah meningkatkan perdebatan publik mengenai legitimasi energi nuklir. Negara menghadapi posisi dilematis dalam penggunaan energi nuklir. Penelitian ini berusaha memahami kompleksitas yang dihadapi negara dalam legitimasi energi nuklir ini dengan fokus kepada aspek-aspek penentu legitimasi dan akuntabilitas serta peran organisasi internasional di dalam pengawasan penggunaan energi nuklir.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana negara menghadapi dilema dan kompleksitas legitimasi energi nuklir dalam ekonomi politik internasional dengan menggunakan studi kasus kebocoran reaktor nuklir PLTN Fukushima.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan memberikan analisis yang mendalam terkait dilema dan kompleksitas legitimasi energi nuklir dalam ekonomi politik internasional dengan menggunakan studi kasus kebocoran reaktor nuklir PLTN Fukushima.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan teoretis. Kegunaan praktis berkenaan dengan pencapaian *energy security* dari pembangkit listrik tenaga nuklir sedangkan kegunaan teoretis berkenaan dengan pengembangan pemikiran English School.

2. Kajian Pustaka

2.1 Energy Security

Florian Bauman (2008, 4-10) mengatakan bahwa *energy security* adalah sebuah konsep multi-dimensional. Terdapat empat dimensi yang terkandung dalam ES yaitu dimensi internal, dimensi ekonomi, dimensi keamanan dan dimensi geopolitik. Dimensi internal mengarah kepada kebijakan politik ekonomi negara di dalam memperbesar produksi energi. Sebagai contoh, intervensi negara dalam kebijakan perusahaan minyak negara berinvestasi di dalam membangun kilang minyak baru. Dimensi yang kedua adalah dimensi ekonomi. Dimensi ini terkait dengan pasar energi yaitu penentuan harga yang disepakati produsen dan konsumen. Kompetisi efisiensi produsen energi dapat menghasilkan harga yang menguntungkan konsumen. Dimensi geopolitik terkait dengan pertarungan negara di dalam merebut akses energi dengan menggunakan perusahaan transnasional. Sebagai contoh, Arab Saudi menghentikan produksi minyak pada tahun 1973 sebagai simbol protes terhadap kemenangan Israel. Dimensi keamanan terkait dengan keamanan fisik sumber energi. Negara harus mempersiapkan kekuatan militer dan politik untuk menghadapi ancaman sabotase dari teroris atau pembajak.

ES menjadi sebuah konsep krusial karena tidak ada jaminan ketersediaan energi. Begitu banyak ancaman yang mengganggu pasokan energi. Yergin (2006, 74-5) mengamati berbagai masalah seperti terorisme, konflik bersenjata di berbagai eksportir minyak bumi, kompetisi ketat perebutan akses energi menjadikan negara memformulasikan ES. Yergin mengatakan terdapat tiga konsep yang berkaitan dengan ES yaitu diversifikasi energi, *security margin* dan organisasi internasional. Negara harus melakukan diversifikasi sumber energi yaitu pelepasan ketergantungan dari satu jenis energi dan satu produsen energi. Apabila terjadi masalah internal di sebuah negara produsen minyak, negara masih memiliki banyak sumber

produksi energi dan banyak jenis energi. Kedua, ES berkaitan dengan *security margin*. *Security margin* adalah cadangan energi negara di dalam mempersiapkan menghadapi krisis energi. ES juga berkaitan dengan organisasi internasional. Peran organisasi internasional di dalam memberikan informasi energi sangat krusial. Di dalam situasi krisis, informasi yang berkualitas dapat mengurangi panik dan kekacauan (Yergin 2006, 76).

Peran organisasi internasional dalam kaitan dengan ES dibahas juga oleh Ann Florini. Ia mengatakan bahwa banyaknya masalah yang terkait ES, pembahasan mengenai tata kelola energi global menjadi krusial. Masalah pemanasan global, eksploitasi manusia dan kegagalan pasokan energi yang berulang kali terjadi di berbagai negara menjadi faktor pendorong eksistensi sebuah tata kelola energi global. Florini (2010, 138) mencatat beberapa organisasi internasional dibangun untuk menyelesaikan masalah-masalah ES seperti International Energy Agency, Group of Eight, dan Energy Charter Treaty. Florini mengatakan bahwa kegagalan organisasi internasional tersebut memunculkan gagasan organisasi internasional yang lebih berkuasa. Sebagai contoh, merespons embargo minyak bumi oleh Arab Saudi pada tahun 1973, Amerika Serikat membentuk International Energy Agency (IEA) pada tahun 1974 dan memiliki program tukar-menukar informasi terkait harga produksi, jumlah produksi dan cadangan sumber energi. Program ini gagal dilaksanakan akibat revolusi Iran pada tahun 1979. Berbagai program IEA lainnya seperti *minimum safeguard prices* dan *oil imports targets* gagal dilaksanakan akibat lemahnya komitmen negara produsen minyak bumi.

Asia Pacific Energy Resource Center (2007) mengembangkan pengukuran ES dengan sangat detail dengan menggunakan empat indikator 4A yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability* dan *Affordability*. *Availability* merupakan ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri.

Accessibility menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. *Affordability* meliputi biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan *Acceptability* memperhatikan penggunaan energi yang sensitif terhadap penerimaan masyarakat. Penekanan pendekatan APERC ini adalah penggabungan kontinuitas pasokan energi dan harga yang terjangkau bagi pembeli.

Aleh Cherp dan Jessica Jewell (2014) mengelaborasi indikator 4A dengan menyesuaikan 4A sesuai pemangku kepentingan ES. Bagi rumah tangga dan pengguna individu, *affordability* berarti harga yang lebih murah dibandingkan pendapatan rumah tangga. Bagi perusahaan dan industri, *affordability* berarti harga yang lebih murah dibandingkan harga kompetitor. Bagi negara bangsa, *affordability* berarti harga yang disepakati tidak menjadikan biaya energi yang lebih besar dari pendapatan negara. Bagi perusahaan energi, *affordability* harus memastikan keuntungan maksimal bagi perusahaan.

2.2 Aktivisme Transnasional

Konsep aktivisme transnasional pertama kali dikemukakan oleh Porta and Marchetti dalam tulisannya pada tahun 2011 berjudul "Transnational Activism and Global Justice Movement". Sidney Tarrow kemudian mengelaborasi konsep ini dalam buku "The New Transnational Activism" pada tahun 2015. Porta dan Marchetti (2011, 428) mendefinisikan gerakan transnasional sebagai sebuah gerakan protes terhadap masalah-masalah sosial yang melibatkan organisasi internasional dan dua atau lebih negara serta ruang lingkup yang melewati batas negara. Menurut Sidney Tarrow (2015, 20), aktivisme transnasional dibangun dari tiga pilar pendukung yaitu struktur domestik, interaksi

transnasional dan ekonomi politik internasional. Struktur domestik bersifat reaktif terhadap tekanan dari negara dan organisasi internasional serta menjadi faktor pendorong interaksi transnasional. Melalui pembahasan ekonomi politik internasional, *non-governmental organizations* (NGOs) dapat ditumbuhkembangkan menjadi aktor yang sejajar dengan negara.

Dalam konsep aktivisme transnasional, *non-governmental organizations* (NGOs) menjadi aktor utama karena posisi NGOs yang aktif melakukan gerakan protes dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Clarke (1998, 2-3) mendefinisikan NGOs sebagai organisasi yang berorientasi kesejahteraan sosial, tidak mencari keuntungan dan memiliki kekhususan karakter hukum. NGOs dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu kategori lokasi dan kategori tujuan. Berdasarkan kategorisasi lokasi, NGOs dibedakan menjadi NGOs utara dan NGOs selatan (Kim 2011, 20). Umumnya NGOs utara adalah NGOs donor bantuan keuangan ke NGOs selatan. Interaksi dapat juga bersifat tukar-menukar informasi untuk kesuksesan sebuah gerakan internasional. Interaksi antara NGOs utara dan NGOs selatan bersifat dinamis dan fleksibel. Berdasarkan kategorisasi tujuan, NGOs dibedakan menjadi NGOs advokasi (*outsider*) dan NGOs operasional (*insider/lobbyist*). NGOs advokasi biasanya menggunakan pendekatan radikal yang berseberangan dengan posisi negara dan korporasi sedangkan NGOs pelaksana menggunakan pendekatan kerjasama yang berdekatan dengan negara dan korporasi.

Sama halnya dengan Kim, Donatella Della Porta dan Mario Diani menghasilkan bagan untuk menjelaskan strategi aktivis transnasional untuk mempengaruhi kebijakan. Terdapat empat posisi yang dapat diambil aktivis yaitu *advising*, *advocacy*, *lobbying*, dan *activism*. *Lobbying* dan *advising* dikategorisasikan sebagai *insider* sedangkan *activism* dan *advocacy* dikategorisasikan sebagai *outsider*.

Mengapa NGOs menjadi penting dalam ekonomi politik internasional? Pertama, berbagai proyek yang ditangani NGOs dijalankan dengan sangat efisien dan melibatkan sumber daya manusia yang minimal. Kebalikannya, negara memiliki struktur birokratis dengan alur yang sangat panjang membuat bantuan kemanusiaan internasional menjadi sangat rawan hilang atau dikorupsi. Penelitian yang dilakukan UNDP pada tahun 1993 memperkirakan bantuan resmi yang diberikan pemerintah gagal menyentuh kaum miskin senilai 20% sedangkan peluang NGOs untuk menemui kegagalan sekitar 5% (Raffer and Singer 1996, 138). Catholic Relief Services hanya menghabiskan 4,78% dari total bantuan untuk gaji staf dan administrasi. 95% dari bantuan Catholic Relief Services langsung disalurkan kepada penerima bantuan (Kim 2011, 18).

Karakter yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan oleh NGO berbasis komunitas. Artinya NGOs lebih mengutamakan pendekatan mikro yang menyentuh langsung masyarakat. Raffer dan Singer (1996, 138) memberikan istilah '*human-face intervention*'. NGO memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bekerja pada level '*grassroot*' dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. *Decentralized structure* dan *local contacts* memungkinkan NGO melakukan hal tersebut. *Micro-loans* khusus untuk ibu-ibu rumah tangga dan Grameen Bank di Bangladesh merupakan terobosan-terobosan baru untuk menjangkau lebih dekat dengan masyarakat miskin. NGOs juga memiliki *preventive action* dan *early warning*. Ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan begitu banyak fasilitas publik dan menewaskan begitu banyak orang, NGOs langsung mendapat prioritas utama dalam penanganan bantuan kemanusiaan.

Kekhususan ketiga adalah hubungan antar bangsa yang dimiliki NGOs. Cabang dan jaringan yang dimiliki NGOs dapat menjangkau seluruh negara di dunia ini. Tanpa harus terganggu oleh masalah kedaulatan,

NGOs dapat terus menerima dan memberikan informasi keadaan kepada NGOs lainnya di belahan dunia lainnya. Seperti yang tergambar di bawah, NGOs akan mencari dukungan dari NGOs negara lain dengan menyebarkan informasi dan berharap NGOs negara luar akan menekan sikap dan posisi negara tersebut sehingga menekan langsung negara tujuan. Skenario lainnya adalah NGOs akan mencari dukungan dari organisasi internasional dengan harapan organisasi tersebut akan menekan negara tujuan.

NGOs menjadi aktor yang sejajar dalam ekonomi politik internasional karena kekuatan ekonomi yang dimiliki NGOs. Begitu banyak NGOs yang mampu mendanai berbagai proyek-proyek penyelamatan lingkungan dengan skala besar. WWF-AS memberikan kontribusi 12,9 juta Dollar AS untuk pelaksanaan 407 proyek lingkungan di 33 negara. Dari tahun 1980-an hingga tahun 1990-an WWF mendanai lebih dari 2.000 proyek lingkungan di seluruh dunia dengan total dana 62,5 juta Dollar AS (Princen 1994, 29). Masih banyak NGOs lainnya yang memiliki kekuatan finansial sangat besar seperti Greepeace dan Great Lakes United (GLU). Tentu bagi institusi negara dan masyarakat lokal, proyek-proyek ini sangat berguna bagi mereka.

Kekuatan informasi juga menjadi kekuatan unik dari NGOs. NGOs mampu untuk menarik perhatian media massa. Seperti NGOs dalam bidang lainnya, media massa menjadi “tulang punggung” bagi aktivitas NGOs. Greepeace dengan stasiun televisi lokalnya, WWF dengan keanggotaan internasionalnya akan mampu menjadi media publikasi efektif bagi kegiatan mereka. Kemampuan NGOs untuk menyediakan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai isu lingkungan yang digelutinya. Negara dan organisasi internasional belum tentu melakukan penelitian dan pengumpulan data secara rutin mengenai masalah-masalah lingkungan. Mereka akan melakukan

tindakan diatas dalam kondisi krisis-reaktif. NGOs dengan kemampuan risetnya mampu menjangkau semua lapisan sehingga dapat. NGOs mampu memaksa aktor-aktor lingkungan memberikan transparansi data dan informasi. Dengan kemampuan NGOs menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif maka *information gap* yang biasanya sering menjadi hambatan akan berkurang. Masyarakat yang seringkali tidak mampu mengakses informasi kini dapat menerima informasi secara simetris. Klarifikasi dan respons terhadap pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat pemerintah akan mempermudah proses transparansi data.

3. Objek dan Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah metodologi interpretasi dan kualitatif. Penelitian ini hendak mencari makna dan proses serta konteks dari studi kasus yang diangkat. Menurut Denzin dan Lincoln (2011: 12), penelitian kualitatif menggunakan lebih dari satu metode dan menekankan kemampuan interpretasi penulis. Creswell (2003: 23-25) menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang kompleks dan membutuhkan gambaran yang menyeluruh. Masalah yang kompleks mengacu kepada masalah yang bersifat multi-dimensional, paradoks, dan dilematis. Tujuan yang dicapai dari sebuah penelitian kualitatif adalah memahami makna, proses, latar belakang dan mencari kausalitas dan pola.

Hal ini sesuai dengan fungsi teori dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen untuk memahami masalah. Terdapat dua tujuan teori yaitu penjelasan (*explaining*) dan pemahaman (*understanding*) dalam penelitian (Kurki and Wight, 2010: 20). Pemikir neo-realis dan neo-liberalis mengedepankan simplikasi fenomena hubungan internasional ke dalam berbagai formula dan rumus yang dapat diaplikasi ke dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Tujuan teori bagi pemikir neo-realis dan neo-

liberalis adalah untuk menjelaskan (*explaining*). Teori adalah alat untuk melakukan simplifikasi tersebut sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai rumus-rumus matematis yang sering digunakan ilmuwan fisika dan kimia. Pemikir ES memprioritaskan pemahaman peneliti mengenai signifikansi makna (*meaning*), simbol dan nilai yang digunakan negara. Teori adalah alat untuk memahami kompleksitas dan kerumitan kenyataan. Tujuan teori bagi pemikir ES adalah untuk memahami (*understanding*).

Penggunaan metode kualitatif terkait erat dengan teori English School yang digunakan penelitian ini. Seperti yang diuraikan dalam sub-bab tinjauan pustaka, English School adalah teori yang menjelaskan bukan hanya kompetisi mengejar kekuatan dan kekuasaan tetapi juga perdebatan mengenai legitimasi, keanggotaan, pengakuan, kesetaraan, peran, resiprokalitas, perjanjian, kebiasaan, atau kerugian. Untuk menjelaskan kompetisi mengejar kekuatan dan perdebatan nilai, English School memiliki kerangka pemikiran pluralisme dan solidarisme. Definisi kedua pilar ini sudah dijelaskan dalam kerangka pustaka. Metode penelitian kualitatif menjadi fondasi bagi perdebatan ini. Reus Smith menekankan perdebatan ini dengan mengatakan *“This distinction has since provided the basic framework for debate within the English School about the scope for, and desirability of, moral action in international relations, a debate which itself marks the School off from parallel trends in American thinking”* (Reus-Smith. 2009: 64-65).

Nicholas Wheeler dan Robert Jackson adalah peneliti English School yang menggunakan dikotomi pluralisme dan solidarisme dalam penelitiannya. Wheeler menulis buku *Saving Stranger* diawali dengan perdebatan antara pluralisme dan solidarisme dan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang besar masyarakat internasional menuju skenario solidarisme.

Robert Jackson juga menggunakan dikotomi solidarisme dan pluralisme dan menemukan pola-pola pluralisme yang terjadi terus-menerus dalam masyarakat internasional.

Metodologi interpretasi yang digunakan English School merupakan respons terhadap neo-realisme dan neo-liberalisme yang menggunakan metodologi positivisme. Metodologi positivisme berangkat dari kekusaran pemikir hubungan internasional terhadap ilmu hubungan internasional yang tidak memiliki model matematis yang digunakan ilmu eksakta. Positivis juga menekankan data penelitian dapat diukur secara tepat dan rinci agar data tersebut dapat diolah menjadi sebuah kalkulasi statistik yang dapat ditetapkan sebagai sebuah kaidah. Bahkan Morton Kaplan (1968: 35) mengatakan, *“If you cannot measure it, your knowledge is meagre and unsatisfactory”*. Positivis seperti Kaplan dan Martin Singer mengkritik pemikir realis klasik mengenai konsep *power* dan kepentingan nasional yang tidak memiliki penjelasan matematis dan model yang dapat direplikasi dalam penelitian hubungan internasional.

Pemikir English School menolak metodologi positivisme karena metodologi positivisme gagal melihat nilai dan norma yang memotivasi negara mempengaruhi negara lain. Nilai, norma dan keyakinan merupakan komponen penting hubungan internasional yang sifatnya tidak terlihat. Butterfield dan Wight menekankan hal ini dengan mengatakan: *“by contrast with those studies of state-systems which view them as determined purely by mechanical factors such as the number of states in the system, their relative size, the political configuration in which they stand, we placed emphasis on the norms and values that animate the system, and the institutions in which they are expressed”* (Butterfield and Wight, 1966: 17).

Penelitian ini terinspirasi dari perdebatan utama hubungan internasional. Metodologi penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang terkait perdebatan utama

hubungan internasional. Perdebatan norma yang terjadi membutuhkan metodologi interpretasi. Terjadi dialog konstan terkait masalah lingkungan hidup antara pemikir HI. Peneliti memotret perdebatan ini melalui kajian literatur. Melalui berbagai artikel jurnal dan buku yang ditulis pemikir HI, peneliti dapat mencari butir-butir pemikiran dan dikategorisasikan dalam pluralisme dan solidarisme yang telah dikembangkan pemikir English School. Dialog antara pemikir HI menjadi data penelitian dan diolah menggunakan teori English School. Proses penelitian ini adalah mencari data, mengkategorisasikan data, mencari titik koeksistensi, formulasi konsep berdasarkan titik koeksistensi tersebut. Peneliti menginterpretasikan studi kasus menjadi makna yang memotivasi kebijakan dan tindakan negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal dan *process tracing*. Dalam riset dengan menggunakan sebuah studi kasus, peneliti akan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya (Creswell, 2003: 133). Sebagai hasilnya, diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan konsekuensi ilmiah dan akademis dari fenomena tersebut.

Porta dan Keating (2008: 148) memberikan beberapa alasan mengapa penelitian dengan metode studi kasus tunggal dapat menjadi metode efektif dalam membangun teori. Dialog intensif antara cara berpikir peneliti dengan data menjadi kelebihan dari metode ini. Penggunaan sebuah studi kasus dapat membuka keragaman dari sebuah kasus dengan melihat sejarah kasus tersebut. Kompleksitas hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara rinci. Penjelasan sebuah studi kasus tidak dimaksudkan untuk generalisasi ke dalam

kasus lain. Teori tidak mendefinisikan perilaku namun perilaku negara yang membangun sebuah teori. Sudut pandang yang dipakai adalah dialog dua arah dan terus-menerus antara pendekatan empiris dan teoretik.

Penelitian ini mengaplikasikan ES ke dalam studi kasus perbandingan kebijakan luar negeri Clinton dan Trump terkait intervensi kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode *process-tracing*. Metode ini berusaha mengidentifikasi proses sebab-akibat dengan variable independen dan variable dependen. Metode ini dielaborasi secara intensif oleh Alexander George and Andrew Bennett dalam buku *Case Studies and Theory Development in Social Sciences*. Metode *process-tracing* mempelajari urutan peristiwa dengan tujuan menguji hipotesis tertentu apakah konsisten dalam urutan peristiwa yang dipilih peneliti. Penelitian ini menguji hipotesa apakah kepentingan negara yang tertuang dalam kebijakan luar negeri selalu bertolak belakang dengan intervensi kemanusiaan?

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Bencana Nuklir

Bencana nuklir Fukushima Daiichi pada Maret 2011 membawa dampak serius bagi industri perikanan di Jepang. Bencana nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl pertengahan tahun 1986 dan di Fukushima Daiichi mengakibatkan krisis makanan dan perdagangan yang pasti merugikan negara dimana bencana tersebut terjadi. Unsur radioaktif yang mengkontaminasi produk pangan akan menurunkan minat konsumen untuk membeli makanan tersebut karena bahaya dari radioaktif bagi kesehatan manusia. Sehingga konsumen akan melindungi kesehatannya dari radioaktif dengan tidak membeli makanan tersebut atau mengalihkan untuk membeli makanan dari daerah lainnya yang terbukti lebih aman untuk dikonsumsi.

Terkait dengan kecemasan mengenai terkontaminasinya makanan produksi Jepang, terutama produk perikanan menyebabkan

adanya kerusakan reputasi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang mendefinisikan “kerusakan reputasi” sebagai segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh publikasi negatif yang mengakibatkan konsumen dan asosiasi bisnis untuk tidak membeli produk atau jasa karena ketakutan akan terkontaminasi radioaktif. Rumor negatif yang mengakibatkan kerusakan reputasi pada produk perikanan Jepang akan merugikan para pekerja industri perikanan. Karena pendapatan para nelayan dan pekerja budidaya akan menurun, produknya tidak dapat masuk ke pasaran, atau tidak ada yang ingin membeli produk-produknya.

Banyak negara yang membatasi impor dan meningkatkan pengawasannya terhadap makanan yang diimpor dari Jepang. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, dan negara-negara Asia lainnya seperti Hongkong, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea dan Thailand. Larangan impor dapat bervariasi di setiap negara, *seafood* (baik hasil perikanan budidaya darat maupun hasil laut) dari prefektur yang terkena dampak bencana nuklir dalam skala besar. antara lain dari Fukushima, Ibaraki, Tochigi dan Gunma (The Japan Times 2015).

Bencana nuklir Fukushima Daiichi pada bulan Maret 2011 memicu kebijakan perdagangan berupa pelarangan impor produk-produk perikanan dari Jepang yang dilakukan untuk alasan perlindungan kesehatan manusia. Produk perikanan Jepang mengalami kerusakan reputasi akibat bencana nuklir tersebut yang menyebabkan negara-negara lain tidak mau mengimpor produk perikanan Jepang yang terkontaminasi. Korea Selatan yang merupakan importir hasil perikanan Jepang dalam jumlah besar juga memiliki sikapnya tersendiri pasca bencana nuklir Fukushima Daiichi 2011 dan bocornya air pendingin reaktor Fukushima Daiichi di tahun 2013. Secara umum, sikap Korea Selatan terhadap produk perikanan Jepang juga sangat

berhati-hati terhadap kandungan radioaktif yang terdapat dalam hasil perikanan Jepang. Tindakan yang dilakukan Korea Selatan cukup beragam, mulai dari pengawasan hingga larangan impor dari beberapa prefektur. Sejak bencana nuklir pada Maret 2011, Korea Selatan melarang impor produk perikanan dari 4 prefektur di Jepang antara lain Fukushima, Ibaraki, Tochigi, dan Gunma (McCurry 2013). Sejak terjadinya bencana nuklir Fukushima Daiichi kasus mengenai keamanan pangan sudah menjadi pembicaraan pada negara-negara mitra perdagangan Jepang. Dalam panel resmi forum SPS WTO, Jepang sudah mendesak negara-negara anggota WTO untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap sebaran radiasi dari PLTN Fukushima Daiichi yang meledak dan menerapkan tindakan “tidak adil” dengan menerapkan larangan impor terhadap produk pangan Jepang. Karena pemerintah Jepang sudah mengambil tindakan mengenai keamanan produk pangannya.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Jepang terus melakukan pemantauan terhadap tingkat kontaminasi radioaktif terhadap produk-produk pangannya dalam rangka untuk mencegah resiko keamanan pangan. Pihaknya juga bekerja keras untuk menyediakan informasi yang akurat secepatnya kepada mitra dagangnya dan juga kepada WTO, FAO, WHO, dan badan-badan lainnya.

Upaya politik untuk mendapatkan keringanan ekspor ke Korea Selatan juga pernah dilakukan oleh Yoshihiko Noda, perdana menteri baru yang mengganti Naoto Kan yang dinilai tidak cukup tanggap terhadap penanganan bencana nuklir. Pada *Trilateral Summit Meeting* bulan Mei 2012, Jepang melalui Perdana Menteri Yoshihiko Noda juga mengadakan pembicaraan politik kepada presiden Korea Selatan pada waktu itu, Lee Myung Bak. Pertemuan tersebut membahas mengenai ekonomi. Dalam pertemuan tersebut Jepang meminta kepada presiden Lee Myung Bak untuk mempermudah produk-produk perikanan Jepang, terutama dari 4 prefektur

yang telah dilarang produk perikananannya (Fukushima, Tochigi, Gunma dan Ibaraki) supaya mendapat kemudahan untuk masuk ke pasar Korea Selatan. Tetapi presiden Lee Myung Bak tidak dengan serius menanggapi permintaan yang dilakukan Noda tersebut. Sehingga sepanjang tahun 2012 kebijakan larangan impor dari 4 prefektur tersebut tidak berubah. Larangan impor tetap berlaku dan pemerintah Korea Selatan tetap memantau perkembangan Fukushima Daiichi.

Gagal untuk mempengaruhi Korea Selatan untuk mencabut kebijakan tersebut, maka pemerintah Jepang menempuh langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke WTO. Upaya ini dilakukan karena menurut pemerintah Jepang, tindakan yang dilakukan Korea Selatan tersebut sebagai praktek perdagangan yang tidak adil. Dalam publikasi *WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* nomor G/SPS/GEN/204/Rev.14 Jepang membela bahwa air pendingin yang terkontaminasi tersebut hanya tercampur pada 0.3 km persegi di dalam wilayah Fukushima Daiichi dan kadar kontaminasi radioaktif pada air pendingin tersebut tidak boleh disamakan dengan kadar kontaminasi radioaktif pada produk perikanan Jepang pada prefektur tersebut. Lebih lanjut lagi, Jepang mengingatkan Korea Selatan bahwa *Sanitary and Phytosanitary* dimana persetujuan ini melarang diskriminasi perdagangan dan hambatan lainnya yang tidak perlu. Jepang mendesak Korea Selatan untuk menyediakan dasar-dasar ilmiah kebijakan larangan impornya atau menjelaskan ketidaklengkapan bukti ilmiah dari laporan pemerintah Jepang tersebut (Reuters 2015).

Tindakan Korea Selatan atas kebijakan larangan impor produk perikanan Jepang yang diperluas pada September 2013 sesuai dengan pasal 5.7 persetujuan SPS, dimana tidak cukupnya bukti ilmiah dan potensi kumulatif kontaminasi radioaktif terhadap kesehatan manusia. Adapun pasal tersebut mengizinkan

negara untuk mengambil tindakan perdagangan jika negara eksportir tidak memiliki informasi keamanan mengenai produk pangan yang diperdagangkannya. Menurut Korea Selatan, Jepang tidak menjamin kejelasan dalam penanganan PLTN Fukushima Daiichi dan bencana nuklir secara keseluruhan. Data yang hanya dari pengamatan pemerintah Jepang tidak cukup untuk membuktikan keamanan produk perikananannya dan untuk menurunkan kekhawatiran rakyat Korea Selatan akan radiasi. Sehingga pasal 5.7 merupakan pasal yang cocok untuk menjelaskan sikap Korea Selatan sejak September 2013.

Gerakan anti nuklir menyebar semakin luas di Jepang dengan adanya insiden di PLTN Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Gerakan anti nuklir telah ada di Jepang sejak tahun 1954. Gerakan dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang membeli ikan hasil tangkapan kapal Daigo Fukuryu Maru yang diindikasikan tercemar radioaktif akibat uji coba bom atom oleh Amerika Serikat di Bikini Atoll. Secara umum, terdapat dua bentuk gerakan anti nuklir yang berkembang di Jepang. Bentuk pertama yakni gerakan anti nuklir yang menggunakan metode advokasi. Metode tersebut menekankan pada pengutaraan pendapat dan lobi pada pembuat kebijakan energi sesuai dengan basis ilmu pengetahuan. Beberapa gerakan anti nuklir yang melakukan metode ini yakni Citizens' Nuclear Information Center, aktivis anti nuklir Aileen Smith, aktivis anti nuklir Tetsunari Iida, organisasi APAST, dsb.

Bentuk kedua yaitu gerakan anti nuklir yang menggunakan metode aktivisme. Metode aktivisme dilakukan oleh organisasi atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan golongannya. Bentuk metode kedua ini banyak ditemukan di Jepang. Salah satu contoh aktivisme yang ada yaitu gerakan anti nuklir yang ada di beberapa tempat PLTN berada. Gerakan anti nuklir lokal tersebut memperjuangkan kehidupan penduduk lokal

yang menolak keberadaan PLTN. Contoh gerakan anti nuklir lokal terjadi di daerah Sendai, daerah pembangunan Rokkasho Reprocessing Plant, hingga di Suzu. Selain itu, metode aktivisme ini juga dapat dilihat pada terbentuknya berbagai organisasi anti nuklir yang memiliki berbagai bentuk dan tujuan. Contohnya yaitu Citizens' Committee for the 10 Million People's Petition to say Goodbye to Nuclear Power Plants, STOP-ROKKASHO, Women from Fukushima Against Nukes, Japan Occupational Safety and Health Resource Center, Citizens' Radioactivity Measurement Station, Beautiful Energy dsb. Gerakan anti nuklir di Jepang yang ada sejak tahun 1954 hingga saat ini muncul dengan berbagai bentuk namun dengan satu tuntutan yang sama, yakni keinginan masyarakat Jepang untuk mengurangi penggunaan tenaga nuklir dan keluar dari ketergantungan pada operasi PLTN. Opini publik terhadap penggunaan tenaga nuklir setelah insiden PLTN Fukushima Daiichi pada dasarnya berkembang dari mendukung penggunaan energi nuklir menjadi mendukung pengurangan ketergantungan pada energi nuklir. Pada survei yang dilakukan NHK, terlihat perkembangan prosentase responden yang mendukung pengurangan penggunaan tenaga nuklir dari 32% pada April menjadi 47% pada Juni.

Menurut Jacinta Hin (perwakilan dari Beautiful Energy) "The anti-nuclear protests affect the Japanese government's way of thinking in formulating energy policies." Hal ini cukup terbukti, dimana pemerintah DPJ, baik pada masa PM Kan dan PM Noda merumuskan kebijakan yang mengisyaratkan berhenti menggunakan PLTN. Pada masa PM Noda, diambil kebijakan energi yang didasarkan pada tuntutan masyarakat untuk lepas dari nuklir yang diungkapkan dalam deliberative poll. Diumumkannya "Innovative Energy and Environment Strategy" yang didalamnya tercantum *zero operating nuclear power plants* merupakan sebuah titik terang perjuangan gerakan anti nuklir di Jepang.

4.2 Krisis Legitimasi Energi Nuklir

Perdebatan mengenai legitimasi pembangkit listrik energi nuklir mengemuka kembali setelah kebocoran reactor nuklir Fukushima Jepang. Nuklir mampu menjawab kebutuhan listrik yang begitu besar dibandingkan sumber energi yang lain seperti batu bara, gas, minyak bumi atau angin. Di sisi lain, potensi kerusakan alam yang ditimbulkan dari pembangkit listrik energi nuklir juga sangat besar seperti yang terjadi di Fukushima dan Chernobyl. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan listrik mendesak pemerintah untuk mengorbankan resiko kerusakan lingkungan dengan memutuskan membangun pembangkit listrik energi nuklir seperti yang dilakukan Jepang dan negara-negara maju lainnya. Kebijakan ini merefleksikan pemikiran pluralisme yang memprioritaskan kebutuhan manusia dibandingkan keberlanjutan lingkungan hidup. Solidaritas mempertentangkan hipotesis pluralisme tersebut dengan studi kasus bencana nuklir Fukushima. Kebocoran reactor nuklir Fukushima telah menghancurkan industri perikanan dan lingkungan hidup Jepang. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi mendesak untuk dilaksanakan terlebih dikampanyekan oleh aktivis transnasional. Menjadi pertanyaan adalah mengapa Jepang memilih meneruskan penggunaan energi nuklir dengan resiko kerusakan yang ditimbulkan sangat fatal? Energi nuklir adalah termasuk energi murah dan Jepang memiliki keterbatasan sumber energi untuk mencukupi kebutuhan energinya. Diskursus yang dibangun disini adalah eksploitasi alam dilakukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diperlukan oleh dunia bisnis. Jepang menjadi ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat setelah berubah dari negara pertanian menjadi negara manufaktur dan kini menjadi negara jasa. Salah satu kunci kemajuan Jepang adalah agresifitas perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa Jepang di dalam membuka sektor-sektor bisnis baru dan tentu saja agresifitas ini

membutuhkan modal keuangan yang sangat besar, ketersediaan tenaga kerja dan energi listrik. Oleh karena itu, dari perhitungan bisnis, penggunaan energi nuklir sangat menguntungkan bukan hanya karena biaya produksi yang lebih murah tetapi juga mampu diandalkan menggerakkan sektor-sektor bisnis yang sangat menguntungkan bagi negara secara massal.

Menurut Hurd (1999, p. 1), terdapat tiga faktor yang memotivasi negara untuk mematuhi nilai, norma dan peraturan internasional yaitu paksaan (*coercion*), kepentingan negara (*self-interest*) dan legitimasi. Di dalam masyarakat internasional, kekuatan paksa dan kepentingan negara masih mendominasi faktor penentu kebijakan negara. Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi serta kemunculan aktivis kemanusiaan memunculkan faktor legitimasi dalam masyarakat internasional. Penelitian ini fokus kepada faktor legitimasi.

Suchman (1995, p. 574) mendefinisikan legitimasi sebagai “*a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions*”. Dari definisi Suchman ini terdapat tiga kata kunci yaitu diinginkan (*desirable*), patut (*proper*) dan tepat (*appropriate*). Menjadi pertanyaannya adalah nilai dan norma apa yang memenuhi ketiga syarat tersebut. Bagi pluralis, kepentingan materi dan kedaulatan negara dalam mencapai *energy security* yang secara universal diterima negara sebagai nilai dan norma yang sah memiliki legitimasi. Bagi aktivis transnasional, kepentingan materi standar minimal dan perlu ditambahkan dengan pembangunan berkelanjutan. Muncul perdebatan nilai apa yang menjadi nilai yang mengandung legitimasi.

Dalam konteks penggunaan energi nuklir, faktor pembangunan berkelanjutan dan Aktivisme transnasional selama ini dipinggirkan karena negara memprioritaskan

energy security. Saat ini energi merupakan salah satu hal yang vital bagi kehidupan manusia. Penggunaan akan energi terutama energi fosil yang cadangannya semakin berkurang, sementara konsumsi yang semakin meningkat, seiring dengan berjalannya waktu, energi akan mengalami kelangkaan. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan mengancam kehidupan manusia. Dilihat dari konteks tersebut, energi termasuk isu keamanan saat ini karena kelangkaan energi merupakan ancaman terhadap keamanan. Berdasarkan perspektif ini, negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat *energy security* mulai dari pencarian ladang minyak baru di dalam negeri dan luar negeri, pembangunan sumber energi terbarukan, hingga konstruksi pembangkit listrik energi nuklir.

Konsumsi energi yang tinggi namun tidak disertai sumber energi yang memadai menjadikan Jepang mengimpor bahan pemenuhan energi sekitar 84%. Jepang melakukan impor mulai dari minyak mentah, batubara, hingga gas alam. Jepang merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia di belakang Amerika Serikat dan China, pengimpor terbesar LNG di dunia, dan pengimpor terbesar kedua batubara. Terjadinya krisis minyak di Timur Tengah pada 1973 dan 1978 menjadikan ketergantungan Jepang akan impor bahan bakar fosil mulai dikurangi dengan adanya usaha dari pemerintah maupun industri untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri, salah satunya dengan memperbanyak pembangunan PLTN.

Pada Maret 2002, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Jepang akan bergantung pada energi nuklir untuk mencapai tujuan pengurangan emisi gas kaca sesuai dengan Kyoto Protocol. Sebuah rencana energi 10 tahun telah diberikan ke Ministry of Economy, Trade and Industry pada Juli 2001. Rencana tersebut menyarankan untuk meningkatkan penggunaan pembangkit tenaga

nuklir hingga 30%, dengan perkiraan perusahaan listrik akan memiliki 9 hingga 12 PLTN baru yang dioperasikan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2002 dikeluarkan undang-undang baru, Energy Policy Law, sebagai prinsip utama dari keamanan energi dan persediaan energi yang stabil. Energy Policy Law mengatur tentang Basic Energy Plan yang diperbaharui 3 tahun sekali. Di dalam Basic Energy Plan, dirumuskan energi campuran untuk pasokan energi Jepang. Laporan Energy Information Administration pada tahun 2010 menunjukkan konsumsi energi Jepang masih didominasi oleh minyak, batubara dan gas alam.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bencana nuklir Fukushima telah membawa dampak yang buruk bagi masyarakat Jepang. Bencana nuklir Fukushima adalah bencana terparah di dunia setelah bencana nuklir Chernobyl Ukraina 1986. Dari 54 PLTN yang ada dan beroperasi di Jepang, sekitar 14 unit PLTN diantaranya yang terkena dampak langsung dari bencana gempa dan tsunami secara otomatis berhenti beroperasi. Lebih dari 600.000 penduduk Fukushima harus mengungsi akibat paparan radiasi. Sektor perikanan Jepang juga terpuruk setelah bencana Fukushima. Banyak negara yang membatasi impor dan meningkatkan pengawasannya terhadap makanan yang diimpor dari Jepang. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, dan negara-negara Asia lainnya seperti Hongkong, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea dan Thailand.

Bencana nuklir ini memicu perdebatan pluralis, solidaris, masyarakat internasional dan masyarakat dunia mengenai hierarki konsep dalam ekonomi politik internasional. Penelitian ini membahas tiga konsep yaitu konsep *energy security*, aktivisme transnasional dan pembangunan berkelanjutan. Bagi pluralis, *energy security* menjadi konsep paling penting dan mengalahkan pembangunan

berkelanjutan dan aktivisme transnasional. Energi nuklir tidak seharusnya dihentikan karena energi nuklir berkontribusi signifikan terhadap *energy security*. Sedangkan solidaris meletakkan pembangunan berkelanjutan dan aktivisme transnasional pada posisi paling atas. Meskipun berkontribusi terhadap *energy security*, energi nuklir tidak layak diteruskan karena resiko yang ditimbulkan begitu berbahaya bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Dilema yang dihadapi negara ini justru memunculkan peran negara adikuasa dan perusahaan transnasional yang memulihkan krisis legitimasi energi nuklir Jepang.

Aktivisme transnasional anti-nuklir tidak berhasil menjadi titik putar karena dukungan penuh dari Amerika Serikat sebagai negara adikuasa. Pemerintahan AS dan negara-negara maju lainnya masih menggunakan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik sehingga Amerika Serikat menggunakan kekuatannya untuk memadamkan aktivisme anti-nuklir tersebut dengan mendanai berbagai lembaga penelitian untuk mengembangkan standar keamanan dan keselamatan yang lebih mutakhir.

Daftar Pustaka

- Araujo, Kathleen. 2015. *Japan's Nuclear Energy Choices*. Accessed July 7, 2016. <http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/10/29/commentary/japan-commentary/japans-nuclear-energy-choices/#.V4tdRbh97IV>.
- Ardhana, Wisnu Arya. 2007. *Teknologi Nuklir: Proteksi Radiasi dan Aplikasinya*. Bandung: Penerbit Andi.
- Asia Pacific Energy Research Centre. 2007. *A Quest for Energy Security in the 21st Century*. Tokyo: Asia Pacific Energy Research Centre.
- Blackmore, Daniel. 2013. "Abandoning Nuclear Power: A Social Constructivist Analysis of Germany's Response to Fukushima." *Journal of Politics and International Studies* 9: 87.

- Cherp, Aleh, and Jessica Jewell. 2014. "The Concept of Energy Security: Beyond the Four As." *Energy Policy* 415-421.
- Florian, Bauman. 2008. *Energy Security as a Multidimensional Concept*. Munich: Center for Applied Policy Research.
- Florini, Ann. 2010. "Global Governance and Energy." In *Energy Security: Economics; Politics; Strategies; and Implications*, by Jonathan Elkind and Carlos Pascual, 149-185. Washington: Brookings Institution.
- Kim, Youngwan. 2011. *The Unveiled power of NGOs: how NGOs influence states' foreign policy behaviors*. Iowa: University of Iowa.
- Kingston, Jeff. 2012. *Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan: Response and Recovery After Japan's 3/11*. New York: Routledge.
- Kristiana, Tenny Widya, Lisman Manurung, and Susy Ong. 2015. *Peran gerakan anti nuklir dalam kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kyoto University Graduate School of Global Environment Studies. 2011. *Mega Disaster in a Resilient Society*. Kyoto: Kyoto University.
- Masatsugu Hayashi, Larry Hughes. 2013. "The Fukushima Nuclear Accident and its Effect on Global Energy Security." *Energy Policy* 59: 102-111.
- McCurry, Justin. 2016. *Five years on, cleanup of Fukushima's reactor remain a distant goal*. Accessed July 7, 2016. <https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/11/fukushima-daiichi-nuclear-reactors-decommission-cleanup-japan-tsunami-meltdown>.
- . 2013. *South Korea bans fish imports from Japan's Fukushima region*. September 6. Accessed July 30, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/06/south-korea-fish-japan-fukushima>.
- Princen, Thomas. 1994. "Creating a Niche in Environmental Diplomacy." In *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*, by Thomas Princen and Mathias Finger, 29-47. London: Routledge.
- Purba, Mikhael Benanta. 2013. *Perubahan Kebijakan Keamanan Energi Nuklir Perancis Pasca Peristiwa Fukushima*. Depok: Universitas Indonesia.
- Raffer, Kunibert, and Hans Singer. 1996. *The Foreign Aid Business: Economic Assistance and Cooperation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Reuters. 2015. *Japan asks for WTO panel to rule on S.Korea's Fukushima-related food import restrictions*. August 20. Accessed July 30, 2016. <http://www.reuters.com/article/japan-southkorea-wto-idUSL3N10V3RA20150820>.
- Starr, Steven. 2014. *Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster*. Accessed July 17, 2016. <http://www.psr.org/environment-and-health/environmental-health-policy-institute/responses/costs-and-consequences-of-fukushima.html>.
- Tarrow, Sidney. 2015. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- The Japan Times. 2015. *Russia eases Fukushima-related seafood ban; Taiwan mulls loosening embargo*. July 22. Accessed July 30, 2016. <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/22/national/russia-eases-ban-seafood-imports-japan/#.V5xalrh97IU>.
- Yergin, Daniel. 2006. "Ensuring Energy Security." *Foreign Affairs* 69-82.

